



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan (Creswell, 2014, p. 28).

2.1.1 *How Media Literacy Supports Civic Engagement in a Digital Age*

Penelitian ini dilakukan oleh Hans Martens dari *Univesity of Antwerp* dan Renee Hobs dari *Univesity of Rodhe Island* pada 2013. Artikel jurnal ini dipublikasikan dalam *Atlantic Journal of Communication* pada 30 Juli 2013. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara edukasi literasi media siswa terhadap motivasi untuk mencari informasi dan hubungannya dengan keterlibatan sebagai warga negara.

Bagi generasi muda, edukasi formal dan informal memberikan kontribusi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan keterlibatan sebagai warga negara. Beberapa kompetensi yang saling terkait dianggap berharga untuk mendukung siswa menjadi aktif dalam memberikan respons terhadap berita dan situasi terkini (Martens & Hobbs, 2013, p. 3).

Literasi media memungkinkan generasi muda untuk mencari informasi mengenai isu yang ada, mengevaluasi kualitas informasi tersebut, dan terlibat dalam diskusi dengan individu atau kelompok lain. Hal ini merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara (Martens & Hobbs, 2013, p. 6).

Flanagan, Syvertsen & Stout (2007) dalam Martens & Hobbs (2013, p. 9) menyatakan bahwa keterlibatan sebagai warga negara diukur lewat perilaku, sikap terhadap pemimpin yang terpilih, partisipasi dalam diskusi politik, tingkat konsumsi media dan persepsinya, serta keinginan untuk terlibat dalam kegiatan sosial.

Sebagai warga negara, individu tidak hanya memerlukan akses kepada informasi, melainkan juga membutuhkan motivasi dan alasan untuk melakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh edukasi literasi media siswa terhadap motif pencarian informasi dan pengaruhnya dalam keterlibatan sebagai warga negara (Martens & Hobbs, 2013, p. 3).

Martens dan Hobbs menerapkan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimen dengan 2x2 struktur faktor. Faktor pertama membandingkan kelompok siswa yang mengikuti program edukasi literasi media dengan penerimaan terbuka (*open admission*) dan mereka yang mengikuti program edukasi literasi media dengan penerimaan terbatas (*selective admission*). Faktor lainnya membandingkan siswa berdasarkan partisipasi dalam program tersebut, yakni membagi siswa menjadi kelompok yang mengikuti program dan tidak mengikuti program (Martens & Hobbs, 2013, pp. 11-12).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti penerimaan terbatas memiliki tingkat pengetahuan media dan keterampilan analisis media yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tingkat pengetahuan media dan keterampilan analisis media sangat terkait dengan kemampuan akademis siswa. Penelitian juga menunjukkan bahwa mereka yang mengikuti program edukasi literasi media

memiliki tingkat pengetahuan media dan keterampilan analisis media yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengikuti program edukasi (Martens & Hobbs, 2013, p. 20).

Martens & Hobbs (2013, p. 20) juga menemukan bahwa motif pencarian informasi berkaitan dengan keterampilan analisis media. Namun, waktu yang digunakan internet memiliki hubungan negatif dengan motif pencarian informasi dan keterampilan analisis media.

Dalam hal keterlibatan sebagai warga negara, penelitian ini menemukan bahwa motif pencarian informasi dan keterampilan analisis media memiliki pengaruh yang kuat dengan keterlibatan sebagai warga negara. Namun, partisipasi dalam program edukasi literasi media tidak memiliki pengaruh besar terhadap keterlibatan sebagai warga negara (Martens & Hobbs, 2013, p. 23).

Perbedaan yang ada di dalam penelitian ini adalah peneliti tidak mengkaji literasi media melainkan tingkat literasi media dan informasi yang dikembangkan oleh UNESCO. Namun, instrumen keterampilan analisis media adalah salah satu indikator yang ada dalam konsep LMI milik UNESCO.

Penelitian ini juga menyatakan bahwa keterampilan analisis media memiliki hubungan dengan keterlibatan sebagai warga negara. Ini menunjukkan bahwa salah satu indikator dari LMI memiliki hubungan dengan partisipasi warga negara.

2.1.2 Digital Media Literacy Education and Online Civic and Political Participation

Penelitian ini dilakukan oleh Joseph Kahne dari *Mills College*, Nam Jin Lee dari *College of Charleston* dan Jessica Timpany Feezell dari *UC Santa Barbara*.

Penelitian ini diterbitkan dalam *International Journal of Communication* 6 pada 2012.

Fokus utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dari edukasi literasi media digital terhadap partisipasi politik secara *online*. Penelitian ini juga ingin melihat apakah edukasi literasi media memiliki hubungan dengan keberagaman sudut pandang.

Paparan media baru memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan politik dan bermasyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk menilai tingkat literasi media digital dan hubungannya dalam mendukung generasi muda dalam partisipasi politik (Kahne, Lee, & Feezell, 2012, p. 2).

CIRCLE (2011) dalam Kahne, Lee, & Feezell (2012, p. 2) menyatakan bahwa partisipasi politik dewasa muda berada di tingkat yang lebih rendah daripada yang diharapkan. Tidak hanya tingkat partisipasi yang rendah, penyebarannya pun tidak merata. Generasi muda dengan edukasi yang lebih baik cenderung tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Hal yang menarik adalah, antara mereka yang pernah berkuliah dengan mereka yang tidak berkuliah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal partisipasi politik secara *online* seperti berdiskusi mengenai politik di blog atau media sosial.

Walaupun terdapat banyak hal positif mengenai dampak literasi media terhadap partisipasi politik secara *online*, muncul juga beberapa hal yang menjadi perhatian. Beberapa akademisi mengungkapkan kekhawatiran mengenai sifat media baru yang memungkinkan penggunaanya memilih apa yang ingin mereka

baca. Khalayak media juga mampu memilih dengan siapa mereka ingin berinteraksi dalam media baru. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan khalayak media hanya akan terpapar dengan informasi dari mereka yang memiliki sudut pandang yang sama (Kahne, Lee, & Feezell, 2012, p. 4).

Arendt (1968), Habermas (1989), dan Mill (1956) dalam Kahne, Lee, & Feezell (2012, p. 4) menyebutkan bahwa dalam teori politik tradisional, paparan informasi yang hanya memiliki satu sudut pandang akan membahayakan. Sementara itu, paparan terhadap berbagai sudut pandang akan membawa manfaat untuk memahami kompleksitas suatu masalah. Hal ini akan mengembangkan kemampuan individu dalam hal opini publik dan toleransi.

Hargittai (2010) dalam Kahne, Lee, & Feezell (2012, p. 4) menyatakan bahwa generasi muda memiliki kemampuan literasi yang rendah. Kemampuan literasi media digital tidak tersebar merata di antara masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat diatasi dengan edukasi literasi media lewat sekolah. Jenkins (2006) dalam Kahne, Lee, & Feezell (2012, p. 5) memberikan argumen bahwa edukasi literasi media digital dapat mengatasi masalah kesenjangan tingkat literasi media digital di antara generasi muda. Kahne, Lee, & Feezell (2012, p. 5) mengutip Buckingham (2003) dan Jenkins (2006) yang menyatakan bahwa keterampilan literasi media digital dibutuhkan oleh generasi muda untuk memeriksa dan membandingkan berbagai informasi politik yang tersedia secara *online*.

Penelitian ini ingin mencari tahu hubungan antara edukasi literasi media dengan partisipasi politik secara *online*. Selain itu, penelitian ini juga mencari apakah edukasi literasi media mendukung individu untuk menerima paparan

informasi yang memiliki beragam sudut pandang (Kahne, Lee, & Feezell, 2012, p. 5)

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Survei dilakukan sebanyak dua kali di sekolah yang sama dengan rentang waktu satu tahun. Dalam survei kedua, sebesar 41,7% adalah responden yang sama dengan responden survei pertama. Hal ini terjadi karena adanya siswa yang tidak hadir saat penelitian dilaksanakan dan keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan survei pada siswa tingkat atas (Kahne, Lee, & Feezell, 2012, p. 6).

Dari penelitian ini, didapatkan hasil bahwa dalam tingkat sekolah menengah atas, ada pembelajaran yang memiliki keterkaitan dengan literasi media digital. Namun, pembelajaran yang terkait dengan literasi media digital lebih banyak didapatkan di tingkat perguruan tinggi (Kahne, Lee, & Feezell, 2012, p. 11).

Performa akademis siswa tidak memiliki hubungan terhadap partisipasi dalam edukasi literasi media digital di sekolah. Ketertarikan terhadap politik pada siswa sekolah menengah atas tidak terkait dengan kegiatan literasi media digital di sekolah. Sebaliknya, dalam tingkat perguruan tinggi, ketertarikan terhadap politik memiliki hubungan dengan kegiatan literasi media digital (Kahne, Lee, & Feezell, 2012, p. 13).

Uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi literasi media digital memberikan dukungan yang signifikan terhadap partisipasi politik secara *online* dalam tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi (Kahne, Lee, & Feezell, 2012, p. 14). Sementara itu, edukasi literasi media digital juga terkait secara positif terhadap penerimaan informasi dengan sudut pandang yang beragam.

Dari penelitian ini, dapat dilihat perbandingan antara perbedaan tingkat edukasi literasi media di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Hal ini memiliki hubungan dengan ketertarikan terhadap politik. Sekolah menengah atas memiliki tingkat literasi media yang rendah, dan menunjukkan ketertarikan terhadap politik yang rendah juga. Sebaliknya, perguruan tinggi menunjukkan tingkat edukasi literasi media yang tinggi, begitu pula dengan tingkat ketertarikan terhadap politik. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya edukasi literasi media diterapkan dalam tingkat kurikulum, agar mampu mengembangkan kompetensi literasi siswa.

2.1.3 Measuring Media Literacy for Media Education: Development of a Questionnaire for Teachers' Competencies

Artikel jurnal ini ditulis oleh Mathea Simos, Will Meeus, dan Jan T'Sas dari *University of Antwerp*. Jurnal ini diterbitkan pada 2017 dalam *Journal of Media Literacy Education* edisi 9.

Literasi media memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Keluarga memegang peran penting dalam pengembangan literasi media, namun media tidak memberitakan sebatas apa yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, institusi pendidikan memegang peran penting untuk menyiapkan siswa menjadi pengguna media yang baik. Edukasi membantu siswa untuk memiliki kemampuan literasi media dengan cara mengajarkan mereka bagaimana cara bersikap dan mengatasi risiko yang terkait dengan media (Simons, Meeus, & T'Sas, 2017, p. 100).

Frieseem (2013); Frieseem et al. (2014); Neag (2015) dalam Simons, Meeus, & T'Sas (2017, p. 100) menyatakan ada beberapa cara untuk menggabungkan literasi media ke dalam pendidikan. Cara pertama adalah dengan menggunakan mata pelajaran yang sudah ada. Literasi media dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran bahasa, seni, sejarah, ataupun ilmu pengetahuan alam. Hal ini dilakukan dengan membuat siswa mencari, menganalisis, dan menampilkan informasi terkait dengan mata pelajaran tersebut. Yang kedua adalah dengan membuat mata pelajaran tersendiri yang berkaitan dengan media. Yang terakhir adalah dengan membuat tugas atau proyek yang dapat dilakukan siswa yang berkaitan dengan pengembangan literasi media.

Edukasi media yang efektif membutuhkan guru untuk memiliki keterampilan literasi media yang memadai serta memiliki kompetensi untuk membagi keterampilan tersebut kepada siswanya (Simons, Meeus, & T'Sas, 2017, p. 99). Hobbs (2010) dalam Simons, Meeus, & T'Sas (2017, p. 102) memberikan saran untuk menyusun kerangka pengukuran untuk mengukur kemampuan para guru untuk mengimplementasikan literasi media dan digital dalam kurikulum.

Pengukuran tingkat literasi media pada guru memiliki tiga manfaat. Yang pertama, pengukuran ini berguna untuk memberikan informasi mengenai tingkat literasi media kepada guru terkait. Hal ini berguna untuk mengembangkan kemampuan literasi media mereka. Tidak semua guru dalam satu sekolah harus memiliki tingkat literasi media yang tinggi atau memiliki kompetensi literasi media yang sama. Namun seluruh kompetensi media harus dapat diajarkan walaupun melalui guru yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan manfaat selanjutnya, yaitu

untuk mengembangkan kemampuan literasi media guru, dan membantu guru untuk melengkapi kompetensi satu sama lain. Yang terakhir, pengukuran ini bermanfaat untuk pengembangan kebijakan atau kurikulum (Simons, Meeus, & T'Sas, 2017, p. 103).

Artikel ini menjelaskan bagaimana merumuskan sebuah kuesioner untuk mengukur kompetensi literasi media individu atau kelompok. Perumusan ini dilakukan dalam lima tahap. Tiga tahap pertama adalah pengumpulan konsep kompetensi literasi media dan menggabungkannya. Tiga tahap ini meliputi tahap pengumpulan konsep kompetensi literasi media dari literatur, tahap perumusan kuesioner dari literatur, dan tahap pemeriksaan prototipe kuesioner yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang media (Simons, Meeus, & T'Sas, 2017, pp. 103-104).

Tahap keempat adalah percobaan penggunaan kuesioner terhadap tiga guru dan dua individu yang sedang dalam pelatihan untuk menjadi guru. Responden ini kemudian memberikan saran untuk memodifikasi beberapa penulisan dan pemberian deskripsi kepada *item* yang ada dalam kuesioner. Tahap kelima adalah melakukan survei menggunakan kuesioner tersebut (Simons, Meeus, & T'Sas, 2017, p. 104).

Dari proses perumusan, ada 12 kompetensi yang dirumuskan dan kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai menggunakan media. Kelompok kedua membahas mengenai pemahaman media. Kelompok ketiga membahas mengenai kontribusi, yakni penulisan informasi dan membagikan informasi tersebut. Kelompok ketiga juga membahas mengenai partisipasi terhadap media (Simons, Meeus, & T'Sas, 2017, p. 107).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan bersifat valid dan reliabel (Simons, Meeus, & T'Sas, 2017, p. 111). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuesioner ini mampu digunakan untuk mengukur tingkat literasi media dan informasi.

Artikel tersebut menunjukkan pentingnya pengukuran tingkat literasi media guru sebagai bagian dari edukasi literasi media. Dalam artikel ini juga diungkapkan kompetensi literasi media yang dibagi ke dalam tiga kelompok. Hal ini sesuai dengan dimensi yang ada di dalam kerangka kerja pengukuran literasi media dan informasi milik UNESCO (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 57). UNESCO membagi kompetensi literasi media dan informasi menjadi tiga dimensi, yaitu akses, evaluasi, dan kreasi yang kemudian dipecah menjadi 12 indikator. Dimensi dalam kerangka kerja pengukuran UNESCO memiliki persamaan dengan kelompok kompetensi yang disebutkan dalam artikel tersebut.

2.2 Teori

2.2.1 Literasi Media dan Informasi

a. Perkembangan dan Definisi Literasi Media dan Informasi

Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis dengan pemahaman terhadap pernyataan sederhana terkait kehidupan sehari-hari seseorang. Hal ini melibatkan kemampuan membaca dan menulis secara terus menerus dan sering kali melibatkan kemampuan aritmetika dasar. Secara tradisional, literasi dilihat sebagai sebuah aspek dari hak asasi manusia yang

berkaitan erat dengan hak untuk pendidikan (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 25).

Potter (2008, p. 19) mendefinisikan literasi media sebagai seperangkat perspektif yang kita gunakan secara aktif saat terpapar dengan pesan media untuk menginterpretasikan makna dari pesan yang kita temukan.

Istilah literasi informasi digunakan untuk menekankan pentingnya akses terhadap informasi, evaluasi, pembuatan, dan pembagian informasi dan pengetahuan. Sementara itu istilah literasi media menekankan kemampuan untuk memahami, memilih, mengevaluasi, dan menggunakan media sebagai penyedia dan prosesor utama dari informasi (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 29).

Masyarakat berubah dari masyarakat industri menjadi *information society* (masyarakat informasi) atau *knowledge society* (masyarakat pengetahuan). *Knowledge society* adalah masyarakat yang memperlakukan informasi dan pengetahuan sebagai aset yang penting. *Knowledge society* memandang kegiatan penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan pengetahuan sebagai bagian penting dan terintegrasi dari kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Diao, 2014, p. 1).

UNESCO (2005) dalam Diao (2014, p. 2) literasi informasi adalah kemampuan untuk melakukan manajemen pengetahuan dan kemampuan untuk belajar secara terus-menerus. Secara terperinci, literasi informasi merupakan kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi saat informasi diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke

dalam pengetahuan yang sudah ada, memanfaatkan serta mengkomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis.

Literasi informasi dibutuhkan dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mensyaratkan peserta didik untuk memanfaatkan banyak sumber informasi dalam berbagai format (Diao, 2014, p. 3).

Literasi media dan literasi informasi memiliki akar di bidang akademik yang berbeda. Literasi media berakar dari studi tentang media dan kewarganegaraan, literasi media muncul dari ilmu tentang pustaka dan informasi (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 29).

Global Media and Information Literacy Assessment Framework (2013, p. 29) menyatakan bahwa literasi digital berakar dari ilmu komputer dan informatika, dengan menekankan kemampuan untuk menggunakan perangkat digital tertentu. Literasi digital sering dikaitkan dengan literasi informasi, dalam bidang kemampuan untuk mencari dan mengakses informasi secara akurat dan efektif.

Ada beberapa persamaan dari ketiga literasi tersebut (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 30):

1. Literasi media, literasi informasi, dan literasi digital memiliki fokus yang sama yaitu bagaimana mengelola informasi di tengah deras nya arus informasi yang berasal dari media dan teknologi.
2. Literasi media, literasi informasi, dan literasi digital mendukung hak asasi manusia, terutama dalam kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi.

3. Literasi-literasi tersebut menegaskan evaluasi yang kritis terhadap informasi dan konten media.
4. Seluruh literasi memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, mengevaluasi, membuat, dan membagikan informasi.
5. Literasi-literasi tersebut memungkinkan individu untuk memiliki informasi sehingga dapat terlibat dalam perkembangan sosial sebagai kontributor yang sepadan.
6. Seluruh literasi membekali individu dengan kemampuan yang dibutuhkan di abad 21 di mana ada banyak gelombang informasi yang besar datang dari berbagai sumber.

Dalam era derasnya arus informasi, individu harus menguasai kemampuan untuk mengelola, memilih, dan menyusun informasi. Konsep literasi kemudian semakin berkembang sebagai respons dari perubahan pola sosio-politik, ekonomi, dan teknologi. Konsep ini juga berkembang karena tuntutan dan tantangan dari waktu, terutama dalam lingkungan kerja dan masyarakat (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 25&57).

Global Media and Information Literacy Assessment Framework (2013, p. 29) mendefinisikan literasi media dan informasi (LMI) sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, mendapatkan, mengevaluasi, dan menggunakan, serta membuat dan membagikan informasi dan konten media dalam seluruh format, menggunakan berbagai alat, dan dalam cara yang kritis, etis, dan efektif, dalam rangka untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam aktivitas

personal, profesional, dan masyarakat. Kompetensi ini juga mencakup membuat dan membagikan informasi dan konten media dalam berbagai format menggunakan berbagai alat.

LMI memiliki beberapa manfaat (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 36):

- Melindungi kebebasan dan hak asasi manusia dan memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan informasi.
 - Menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membudayakan massa yang kritis di antara seluruh masyarakat yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk merespons tantangan, risiko, ancaman, dan peluang baru, mengingat adanya pengaruh yang signifikan dari informasi, media, dan ICT pada semua bidang kehidupan.
 - Membantu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan mengenai fungsi dari media dan penyedia informasi dalam masyarakat demokrasi, menyediakan pemahaman tentang kondisi yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi tersebut secara efektif dan etis.
 - Membantu menambah kompetensi LMI dalam level institusi dan individu dengan membuat lingkungan yang mendukung dalam level nasional.
- Sebaliknya, ketersediaan kompetensi LMI meningkatkan permintaan terhadap lingkungan yang mendukung dan hasil yang terkait seperti konten baru, jasa, dan produk, begitu pula lapangan pekerjaan, pertukaran budaya dan dialog, yang mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan dan kedamaian.

- LMI meningkatkan proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru kepada masyarakat berusia muda dengan membantu mereka menjadi mandiri, berpikir kritis dan reflektif.

Global Media and Information Literacy Assessment Framework (2013, pp. 38-39) menjelaskan lebih lanjut manfaat dari pengukuran LMI bagi institusi pemerintah dalam bidang pendidikan dan bagi guru yang mengajar maupun yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi guru. Bagi institusi pemerintah, pengukuran LMI dapat menjadi data pendukung untuk mengembangkan kurikulum terkait LMI. Data tersebut juga dapat digunakan untuk menjadi landasan bagi penelitian mengenai cara mengintegrasikan LMI dalam proses belajar-mengajar.

Pengukuran LMI juga memberikan manfaat bagi guru. Data mengenai tingkat kompetensi LMI guru dapat digunakan sebagai landasan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun program pendidikan bagi guru dalam rangka mengatasi kesenjangan kompetensi LMI antar guru. Guru yang mengikuti pengukuran kompetensi LMI juga mendapat informasi mengenai kompetensi LMI mereka sehingga mereka dapat mengambil bagian dari program pelatihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi LMI mereka. Selain itu, pengukuran yang dilakukan juga meningkatkan kesadaran para guru mengenai pentingnya LMI dan dapat mengaplikasikan LMI ke dalam proses belajar-mengajar di kelas (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 39)

b. Kerangka Kerja Pengukuran LMI

Untuk mengukur LMI, diperlukan kerangka kerja pengukuran LMI. Kerangka kerja pengukuran literasi media dan informasi adalah instrumen

pengukuran yang bersifat unik, yang digunakan untuk mengukur kesiapan suatu negara untuk mengambil inisiatif dan kompetensi yang tersedia dalam LMI (2013, p. 37).

Faktor kontekstual pada level individu, komunitas, institusi, dan sosial berbeda antar dan dalam negara. Karena itu, kerangka kerja pengukuran LMI mengakui adanya perbedaan dalam kompetensi, sumber daya, dan infrastruktur yang mendukung perkembangan LMI. Kompetensi dalam level individu tergantung dari seberapa banyak faktor kontekstual yang terlibat. Menimbang elemen-elemen kontekstual tersebut, dan lingkungan terkait, pendekatan dua tingkat dianggap sebagai yang paling layak untuk pengukuran LMI (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 47).

Pendekatan dua tingkat dalam pengukuran LMI digunakan untuk beberapa alasan (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 48). Yang pertama adalah untuk mendukung pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dengan menyediakan data yang berdasarkan kondisi lapangan serta status LMI sehingga mereka dapat mengambil keputusan terkait LMI.

Yang kedua, kerangka pengukuran LMI tidak mengukur literasi media, literasi informasi, dan literasi digital secara terpisah, melainkan akan menggunakan *identified transversal competencies* untuk membuat penilaian LMI terhadap individu atau institusi (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 48).

Yang ketiga, kompetensi dari *key social group* akan diukur berdasarkan keadaan lingkungan, sumber daya, dan infrastruktur yang ada saat pengukuran

berlangsung. Diharapkan bahwa kelompok ini akan merefleksikan faktor kontekstual nasional yang memungkinkan untuk mengembangkan lingkungan yang mendukung perkembangan LMI (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 48).

Yang keempat, dalam buku *Global Media and Information Literacy Assessment Framework* (2013, p. 50) dijelaskan bahwa mengembangkan lingkungan yang mendukung perkembangan LMI bagi guru akan membuat mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam memberikan edukasi yang berkualitas kepada siswa.

1. Kesiapan Negara

Tingkat pertama dalam kerangka kerja pengukuran LMI adalah kesiapan negara. Tingkat ini menjelaskan level dan kapasitas kesiapan suatu negara untuk pengembangan LMI dalam level nasional.

Dalam satu negara, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas yang sama. Hal ini mempengaruhi perkembangan kompetensi LMI dalam level individual. Karena itulah data kontekstual nasional digunakan sebagai instrumen untuk kajian komparatif dalam negeri (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 51).

Tingkat Kesiapan Negara dalam LMI mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur kesiapan suatu negara. Dalam mengembangkan lingkungan yang mendukung LMI dalam level nasional, ada lima kategori yang dianggap penting (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, pp. 51-53):

1. Edukasi media dan informasi

Membantu para guru untuk memperoleh dasar-dasar LMI dan memastikan bahwa mereka mampu untuk membagikannya kepada siswa mereka akan menjadi investasi yang baik bagi masyarakat. Edukasi yang berkualitas kepada seluruh masyarakat akan menjadi pilar bagi perkembangan ekonomi dan kesehatan. Edukasi yang berkualitas juga membantu mengembangkan masyarakat yang bebas, berpartisipasi aktif, dan demokratis.

2. Kebijakan literasi media dan informasi

Kebijakan LMI diperlukan untuk memastikan adanya pembelajaran LMI yang sistematis. Kebijakan LMI juga memastikan kesuksesan tindakan-tindakan dan faktor lingkungan yang memungkinkan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap LMI.

3. Ketersediaan media dan informasi

Kebijakan yang ada di suatu negara menentukan ketersediaan media dan kualitas informasi yang tersedia bagi masyarakat.

4. Penggunaan media dan informasi

Semakin besar ketersediaan sumber informasi dan teknologi informasi dalam suatu negara, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk terpapar informasi. Akibatnya, semakin besar kemungkinan masyarakat mendapatkan kompetensi LMI baru untuk menggunakan informasi tersebut.

5. Masyarakat sipil

Ada atau tidaknya pihak-pihak yang mendukung perkembangan LMI dan membantu pengembangan LMI di masyarakat.

2. Kompetensi LMI

Kompetensi dipahami sebagai kemampuan seorang individu untuk mengerahkan dan menggunakan kemampuan internal seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memanfaatkan sumber eksternal seperti *database*, kolega, perpustakaan, dan peralatan untuk memecahkan masalah sehari-hari secara efektif. Kompetensi LMI kemudian dirumuskan dalam tiga dimensi. Dimensi tersebut adalah dimensi akses, evaluasi, dan kreasi. (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 55&57).

Dimensi akses dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali, mencari, mengakses, mengambil, dan informasi menggunakan berbagai teknologi yang sesuai. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan dan di mana informasi tersebut dapat ditemukan. Dimensi ini kemudian dirumuskan kembali dalam empat indikator yaitu memahami informasi yang dibutuhkan; mencari dan menemukan informasi; mengakses informasi; serta mengambil dan menyimpan informasi dan konten media (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, pp. 57-58).

Dimensi evaluasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Pemahaman informasi ini akan mendukung terciptanya demokrasi dan pemerintahan yang baik. Dimensi ini juga menyorot pemahaman terhadap media dan sumber informasi. Dalam era

derasnya arus informasi, individu juga harus menguasai kemampuan untuk mengelola, memilih, dan menyusun informasi. Dimensi evaluasi kemudian dirumuskan dalam empat indikator, yaitu memahami informasi dan konten media; menilai informasi dan konten media, mengevaluasi informasi dan konten media; serta mengelola informasi dan konten media (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, pp. 57-58).

Dimensi ketiga adalah dimensi kreasi. Dimensi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memproduksi ulang konten berdasarkan informasi yang didapatkan dan membagikan konten baru tersebut. Dimensi ini juga membahas mengenai penggunaan media dalam cara yang etis. Selain itu dimensi ini juga berbicara mengenai pemantauan informasi serta proses demokrasi sebagai warga negara aktif. Dimensi ini dibagi ke dalam empat indikator, yaitu memproduksi informasi dan konten media; menyampaikan informasi dan konten media dengan cara yang etis dan efektif; partisipasi dalam aktivitas publik sebagai masyarakat yang aktif; dan memantau, penyedia, produksi, dan pengaruh informasi (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, pp. 57-58).

UNESCO menyusun kerangka pengukuran LMI terutama untuk mengukur tingkat literasi guru, baik guru yang sudah mengajar atau masih dalam pelatihan. Hal ini karena guru dianggap memiliki peran untuk pengembangan LMI bagi generasi masa depan (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 55).

2.2.2 Warga Negara Aktif

a. Definisi Warga Negara Aktif

Warga negara aktif dipahami sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam aktivitas publik, baik dalam budaya maupun politik. Batas dari partisipasi ini terletak pada etika yang ada. Aktivitas publik yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, partisipasi dalam kegiatan ekstrem dan kekerasan tidak dikategorikan sebagai partisipasi sebagai warga negara aktif (Hoskins, et al., 2006, pp. 10-11).

Warga negara aktif juga didefinisikan sebagai partisipasi dalam masyarakat, baik sebagai warga sipil maupun mengambil bagian dalam politik. Partisipasi ini sesuai dengan HAM dan tidak melanggar hukum (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 10).

Putnam (2000) dalam Hoskins, Villalba, & Saisana (2012, p. 10), kualitas dari sebuah demokrasi bergantung pada partisipasi masyarakat. Demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memonitor jalannya pemerintahan dan membuat atau menolak perubahan.

Untuk menjadi warga negara aktif, dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang disebut sebagai kompetensi kewarganegaraan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 11).

b. Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan dapat dideskripsikan sebagai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara aktif.

Negara-negara Uni Eropa dalam *European Parliament and Council* (2006) sepakat bahwa kompetensi ini dapat diperoleh lewat edukasi dan pelatihan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 11).

Generasi muda dikatakan sebagai bagian dari masyarakat yang kurang berpartisipasi sebagai warga negara aktif. Mereka dikatakan belum siap untuk melakukan tugasnya mengambil bagian dalam demokrasi (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, pp. 10-11). Guru memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 55).

Pembelajaran mengenai kompetensi kewarganegaraan juga dapat dilakukan melalui edukasi formal, non-formal, dan informal. Diharapkan melalui pembelajaran formal seperti sekolah, kompetensi kewarganegaraan generasi muda dapat berkembang dan memungkinkan mereka menjadi warga negara aktif (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 13).

Untuk memonitor perkembangan dalam edukasi kewarganegaraan, dirumuskan indikator untuk mengukur kompetensi kewarganegaraan. Pengukuran kompetensi kewarganegaraan juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran sistem edukasi dalam perkembangan kompetensi kewarganegaraan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 12).

b. Civic Competence Composite Indicator 2 (CCCI-2)

Civic Competence Composite Indicator 2 (CCCI-2) atau indikator kompetensi kewarganegaraan majemuk dikembangkan oleh *Centre for Research*

on Education and Lifelong Learning (CRELL). CCCI-2 dikembangkan sebagai bagian dari *Education and Training Policy Agenda (ET 2020)* untuk mengidentifikasi warga negara aktif. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan warganya.

CCCI-2 digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur kompetensi kewarganegaraan. CCCI-2 merupakan pengembangan dari CCCI. CCCI-2 dibangun dari data IEA *Civics* dan ICCS tahun 2009 (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 41).

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk melakukan penelitian pedagogi di seluruh dunia. IEA merumuskan *The International Civics and Citizenship Education Study (ICCS)* sebagai pengembangan dari *Civic Education Survey (CIVED)* yang menyajikan data dari indikator gabungan untuk mengukur kompetensi kewarganegaraan. CIVED dirumuskan untuk memperkuat landasan empiris dalam pendidikan kewarganegaraan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 27).

Civic Competence Composite Indicator (CCCI) adalah kerangka pengukuran yang dirumuskan berdasarkan data CIVED tahun 1999. Sementara itu, CCCI-2 dirumuskan berdasarkan ICCS tahun 2009 (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 37).

Pengembangan CCCI-2 dimaksudkan untuk memberikan operasionalisasi dasar yang sama yang digunakan dalam CCCI. Dengan adanya perubahan, muncul

hal-hal baru yang perlu diukur, dan hal inilah yang diadaptasikan ke dalam CCCI-2 (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 41).

Ada empat dimensi dalam CCCI-2. Tiga dimensi mewakili aspek afektif sementara satu dimensi mewakili aspek kognitif (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 42).

Dimensi pertama adalah dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*citizenship value*). Dimensi ini terkait dengan bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 40). Pada CCCI, dimensi ini berbicara mengenai kriteria seorang warga negara yang baik. Pada CCCI-2, dimensi ini berbicara mengenai seberapa pentingnya suatu tindakan untuk menjadi seorang warga negara yang baik (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 45).

Dimensi keadilan sosial mengarah kepada nilai dan perilaku yang terkait dengan pentingnya kesetaraan dan juga rasa tanggung jawab mengenai tindakan terhadap warga negara lain (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 40). Dimensi ini terdiri atas lima buah indikator yaitu nilai-nilai demokrasi, sikap terhadap kesetaraan hak bagi seluruh suku bangsa, sikap terhadap kesetaraan hak untuk imigran, sikap terhadap kesetaraan gender, dan sikap terhadap partisipasi di sekolah (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, pp. 44-45, 51-52).

Dimensi sikap terhadap partisipasi terutama terkait dengan partisipasi yang diharapkan dari warga negara. Sebagian besar indikatornya mengarah kepada partisipasi dalam komunitas, politik, atau sekolah. Dimensi ini juga membahas mengenai minat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik ataupun diskusi di sekolah (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 40).

Pengetahuan demokrasi adalah dimensi terakhir dalam CCCI-2 dan merupakan satu-satunya dimensi di ranah kognitif (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 43). Pengukuran tingkat pengetahuan demokrasi dalam CCCi-2 menggunakan *item-item* pertanyaan dari *international cognitive student test* dalam ICCS 2009 (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 33). Aspek kognitif yang diukur dalam dimensi ini adalah sistem dalam masyarakat, prinsip dalam masyarakat, partisipasi dalam masyarakat, dan identitas sebagai warga negara (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 34).

2.2.3 Guru Sebagai Khalayak Media

McQuail (2011, p. 144) mendeskripsikan kata khalayak sebagai istilah kolektif dari ‘penerima’ dalam proses komunikasi massa. Khalayak merupakan produk konteks sosial serta respons kepada pola pasokan media tertentu.

Nightingale (2003) dalam McQuail (2011, p. 145) mencirikan khalayak ke dalam 4 kategori. Khalayak dapat dilihat sebagai kumpulan orang-orang; sebagai orang-orang yang ditujukan; sebagai pengalaman penerimaan; dan sebagai pendengar. Definisi jenis khalayak berbeda tergantung pada media dan perspektif yang digunakan.

Khalayak massa bersifat besar, heterogen, sangat tersebar, dan anggotanya tidak saling mengenal satu sama lain (McQuail, 2011, p. 147). Definisi khalayak media dekat dengan gagasan khalayak massa karena sering kali sangat besar, tersebar, heterogen, dan tanpa pengaturan atau struktur internal.

Guru didefinisikan sebagai profesi yang titik beratnya berfungsi sebagai sumber dan orang yang menyediakan pengetahuan bagi anak didiknya. Seorang guru memiliki peran untuk mentransfer pengetahuan atau kemampuan yang dimilikinya kepada anak didiknya (Muhson, 2004, p. 93). Syafi'ie (1992) dalam Muhson (2004, p. 94), guru sebagai profesi memiliki tugas mengajar dan mendidik dalam konteks pendidikan.

Guru dianggap sebagai *key social group* yang menghubungkan masyarakat, institusi, dan individu. Mereka membimbing dan mendidik generasi muda dan agen pembawa perubahan. Oleh karena itu, guru dianggap mampu memfasilitasi pengembangan lingkungan yang mendukung pertumbuhan LMI (Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 2013, p. 48).

Kemajuan teknologi digital membawa tantangan berat bagi guru. Guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat teknologi dan tetap menjalankan perannya sebagai kunci untuk menyiapkan anak bangsa menghadapi masa depan (Santo, 2019).

Guru memiliki peran untuk menginspirasi, mendorong refleksi, dan menilai informasi yang diperoleh siswa. Untuk mampu menjalankan perannya, guru mendorong diri untuk terus belajar agar mampu memberikan edukasi yang lebih baik. Guru harus terbuka terhadap hal-hal baru dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk membantu para muridnya dalam menyaring berbagai informasi (Santo, 2019).

Guru perlu memiliki kesederhanaan intelektual, yaitu disposisi bahwa dirinya tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Guru juga harus berusaha

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inklusif untuk memicu kreativitas siswa dalam membuat berbagai temuan baru (Santo, 2019).

2.3 Hipotesis Teoretis

Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi, melalui data sampel (Sugiyono, 2007, p. 84). Rakhmat (2012, p. 14) menjelaskan hipotesis sebagai proposisi yang merincikan teori dan menghubungkannya dengan dunia empiris.

Dalam mencari hubungan antar dua variabel, digunakan hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2007, p. 89).

Creswell (2014, p. 144) menyebutkan ada dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah *null hypothesis* atau hipotesis 0 (H_0). Hipotesis nol membuat prediksi bahwa dalam populasi tidak ada hubungan yang spesifik antara variabel yang diteliti. Hipotesis yang kedua adalah *directional hypothesis* atau hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis ini memberikan prediksi sesuai dengan hasil yang diharapkan, sesuai dengan teori yang ada dalam literatur.

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 = Tidak ada hubungan antara tingkat literasi media dan informasi dengan kompetensi sebagai warga negara aktif pada guru SMA di Tangerang.

H_a = Terdapat hubungan antara tingkat literasi media dan informasi dengan kompetensi sebagai warga negara aktif pada guru SMA di Tangerang

2.4 Alur Penelitian

Demokrasi suatu negara tidak hanya mengandalkan institusi pemerintahan, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif warga negara. Untuk menjadi warga negara aktif, dibutuhkan serangkaian kompetensi yang disebut kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan terdiri atas dimensi nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan sosial, sikap terhadap partisipasi, dan pengetahuan demokrasi.

Untuk memiliki kompetensi kewarganegaraan, individu harus memiliki berbagai kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan literasi media. Seiring dengan perkembangan jaman, konsep literasi media berubah dan bertambah dengan aspek-aspek baru. UNESCO kemudian mendefinisikan konsep ini menjadi literasi media dan informasi (LMI). Konsep LMI terdiri dari dimensi akses, evaluasi, dan kreasi. Dengan LMI, masyarakat akan mampu mengolah informasi yang diterima dan memiliki lebih banyak pengetahuan dan informasi. Akibatnya, masyarakat akan mampu untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang menguntungkan kepentingan umum. Oleh karena itu, pendidikan literasi media penting untuk dilakukan.

Edukasi literasi media dibutuhkan untuk mendidik generasi muda agar memiliki kompetensi kewarganegaraan dengan harapan mereka dapat turut serta berpartisipasi dalam demokrasi. Institusi pendidikan formal seperti sekolah adalah salah satu tempat untuk memberikan edukasi literasi media.

Sebelum memberikan edukasi literasi media, guru harus memiliki kemampuan literasi media itu sendiri. Untuk mengetahui tingkat literasi media guru dan kompetensi kewarganegaraannya, diperlukan pengukuran secara sistematis.

